

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abustan, *Filsafat Hukum Konsepsi & Implementasi*. edisi 1, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Daradjat, Adjat, Kartawijaya, *Hubungan Industrial Pendekatan Komperhensif- Inter Disiplin-Teori-Kebijakan-Praktik*. Bndung: Alfabeta. 2018
- HS,Salim & Septiana Nurbani, Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Mataram: Rajawali Pers.2016.
- HR,Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Rencana Sari Dewi, Gusti Ayu Ketut & Prameswari Vijaya, Diota. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Suryanto, Dasep. *Effective Leadership Communication*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas umum pemerintah yang baik*. Jakarta: Erlangga.2010.
- Zulkarnaen. *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-undang Cipta Kerja(Omnibus Law)*. Bandung: Pustaka Setia. 2021

B. Jurnal

- Andiny Rahimah Kaffah dan Atik Winanti, “Pemberian Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)”,*Jurnal HUMANI*, Vol.11, NO.2, November 2021.
- Fajar Kurniawan dan Wisnu Aryo Dewanto, “Problematika Pembentukan RUU cipta kerja dengan konsep omnibuslaw pada klaster ketenagakerjaan Pasal

89 angka 45 tentang pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5, No.1, Juni 2020.

Moh Hamzah Hisbulah & Ruslina Dwi Wahyuni, ”Deregulasi Hak Upah dan Pesangon Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal studi islam dan sosial*, Vol.3, No.1, Juni 2022.

Ollyvia Cantik Nur Annisa, “Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja”, *Jurnal Equitable*, Vol.8, No.1, 2023.

Pratama Sukamto, “Bab II Landasan Teori,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6841.

Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentan Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684

D. Sumber lainnya

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Dela Cemara Indanh Tahun 2023-2025